



BUPATI CIREBON  
PROPINSI JAWA BARAT  
KEPUTUSAN BUPATI CIREBON

Nomor : 500/Kep.14 -Rek dan SDA/2023  
Lampiran : -

TENTANG

PEMBENTUKAN PANITIA SELEKSI CALON ANGGOTA DEWAN PENGAWAS  
PERUSAHAAN UMUM DAERAH BANK PERKREDITAN RAKYAT KABUPATEN  
CIREBON MASA BHAKTI TAHUN 2023-2027 DAN CALON ANGGOTA DIREKSI  
PERUSAHAAN UMUM DAERAH BANK PERKREDITAN RAKYAT KABUPATEN CIREBON  
MASA BHAKTI TAHUN 2023-2028

BUPATI CIREBON,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 4 ayat (1) dan Pasal 24 ayat (1) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor : 4/POJK.03/2015 tentang Penerapan Tata Kelola Bagi Bank Perkreditan Rakyat, Bank Perkreditan Rakyat yang memiliki modal inti paling sedikit Rp50.000.000.000,- (lima puluh miliar rupiah) wajib memiliki paling sedikit 3 (tiga) orang anggota Dewan Pengawas/Direksi dan paling banyak sama dengan jumlah anggota Direksi/Dewan Pengawas;
- b. bahwa berdasarkan Berita Acara Rapat Kuasa Pemilik Modal (KPM) tentang Pengesahan dan Persetujuan Dewan Pengawas Terhadap Rencana Bisnis Bank (RBB) Tahun 2023 Perusahaan Umum Daerah Bank Perkreditan Rakyat Kabupaten Cirebon pada huruf g menyatakan pemenuhan jumlah pengurus sesuai dengan ketentuan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor : 4/POJK.03/2015 tentang Penerapan Tata Kelola Bagi Bank Perkreditan Rakyat dan akan dilaksanakan tahapan seleksi sesuai dengan ketentuan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2018 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Anggota Dewan Pengawas atau Anggota Komisaris dan Anggota Direksi Badan Usaha Milik Daerah;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pembentukan Panitia Seleksi Calon Anggota Dewan Pengawas Perusahaan Umum Daerah Bank Perkreditan Rakyat Kabupaten Cirebon Masa Bhakti Tahun 2023-2027 dan Calon Anggota Direksi Perusahaan Umum Daerah Bank Perkreditan Rakyat Kabupaten Cirebon Masa Bhakti Tahun 2023-2028;

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia tanggal 8 Agustus 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3472); sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3790);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 305, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6173);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 94 Tahun 2017 tentang Pengelolaan Bank Perkreditan Rakyat Milik Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1375);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2018 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Anggota Dewan Pengawas atau Anggota Komisaris dan Anggota Direksi Badan Usaha Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 700);



8. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 20/POJK.03/2014 tentang Bank Perkreditan Rakyat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 351, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5629);
9. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 4/POJK.03/2015 tentang Penerapan Tata Kelola Bagi Bank Perkreditan Rakyat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5685);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 5 Tahun 2018 tentang Penggabungan Perusahaan daerah Bank Perkreditan Rakyat di Kabupaten Cirebon (Lembaran Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2018 Nomor 5, Seri E.4);
11. Peraturan Bupati Cirebon Nomor 19 Tahun 2020 tentang Perubahan Nama Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Babakan Menjadi Perusahaan Umum Daerah Bank Perkreditan Rakyat Kabupaten Cirebon (Berita Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2020 Nomor 21).

Memperhatikan : 1. Berita Acara Rapat Kuasa Pemilik Modal (KPM) tentang Pengesahan dan Persetujuan Dewan Pengawas Terhadap Rencana Bisnis Bank (RBB) Tahun 2023 Perumda Bank Perkreditan Rakyat Kabupaten Cirebon;

2. Surat Dewan Pengawas Perumda Bank Perkreditan Rakyat Kabupaten Cirebon Nomor : 584.3/07/DP/PUD-BKC/2022 tanggal 23 September 2022 perihal permohonan pemenuhan pengurus Perumda Bank Perkreditan Rakyat Kabupaten Cirebon.

#### MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Membentuk Panitia Seleksi Calon Anggota Dewan Pengawas Perusahaan Umum Daerah Bank Perkreditan Rakyat Kabupaten Cirebon Masa Bhakti Tahun 2023-2027 dan Calon Anggota Direksi Perusahaan Umum Daerah Bank Perkreditan Rakyat Kabupaten Cirebon Masa Bhakti Tahun 2023-2028 dengan susunan keanggotaan sebagai berikut :

1. Penanggung Jawab : Sekretaris Daerah Kabupaten Cirebon
2. Ketua : Prof. Dr. H.Eeng Ahman, MS
3. Sekretaris : Dr. H. Gunawan Undang, M.Si
4. Anggota : Dr. Toni Heryana, MM,CRA,CRP

KEDUA : Tugas Panitia Seleksi sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU adalah sebagai berikut:

1. menentukan jadwal waktu pelaksanaan seleksi;
2. melakukan penjangkaran bakal calon Anggota Dewan Pengawas dan bakal calon Anggota Direksi Perusahaan Umum Daerah Bank Perkreditan Rakyat Kabupaten Cirebon;
3. membentuk tim atau menunjuk Lembaga Profesional untuk melakukan Uji Kelayakan dan Keputusan Calon Dewan Pengawas dan Calon Anggota Direksi;
4. menentukan formulasi penilaian Uji Kelayakan dan Keputusan Calon Anggota Dewan Pengawas dan Calon Anggota Direksi;
5. menerima dan mengolah data hasil pengujian dari tim Uji Kelayakan dan Keputusan Calon Anggota Dewan Pengawas dan Calon Anggota Direksi;
6. menetapkan hasil penilaian dan menetapkan Calon Anggota Dewan Pengawas dan Calon Anggota Direksi;
7. menetapkan peringkat hasil penilaian proses Seleksi Calon Anggota Dewan Pengawas dan Calon Anggota Direksi Perusahaan Umum Daerah Bank Perkreditan Rakyat Kabupaten Cirebon;
8. melaporkan hasil seleksi kepada Bupati; dan
9. menindaklanjuti Calon Anggota Dewan Pengawas dan Calon Anggota Direksi terpilih untuk diajukan Fit and Proper Test kepada Otoritas Jasa Keuangan (OJK).

KETIGA : Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada Diktum KEDUA Panitia Seleksi bertanggung jawab kepada Bupati.

KEEMPAT : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Perusahaan Umum Daerah Bank Perkreditan Rakyat Kabupaten Cirebon.

KELIMA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

**JUDUL**  
Pembentukan panitia anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Cirebon masa bakti tahun 2023-2028 dan masa bakti tahun 2023-2028  
Peraturan Bupati Kabupaten Cirebon tahun 2023-2028  
Bag. per. ekonomi dan SDA

**UNIT PENGELOLA**

**PARAF KOORDINASI PENGELOLA :** .....


JABATAN	PARAF
ESELON II	
ESELON III	
ESELON IV	


**PARAF KOORDINASI KESESUAIAN SUBTANSI DI LINGKUP SEKRETARIAT DAERAH**

JABATAN	PARAF	CATATAN

**Tembusan:**

Ditetapkan di Sumber  
pada tanggal 11 Januari 2023

✓ **BUPATI CIREBON,** 

  
**IMAMRON**

1. Yth. Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Cirebon;
2. Yth. Wakil Bupati Cirebon;
3. Yth. Inspektur Kabupaten Cirebon.



KEDUA : Tugas Panitia Seleksi sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU adalah sebagai berikut:

1. menentukan jadwal waktu pelaksanaan seleksi;
2. melakukan penjaringan bakal calon Anggota Dewan Pengawas dan bakal calon Anggota Direksi Perusahaan Umum Daerah Bank Perkreditan Rakyat Kabupaten Cirebon;
3. membentuk tim atau menunjuk Lembaga Profesional untuk melakukan Uji Kelayakan dan Kepatutan Calon Dewan Pengawas dan Calon Anggota Direksi;
4. menentukan formulasi penilaian Uji Kelayakan dan Kepatutan Calon Anggota Dewan Pengawas dan Calon Anggota Direksi;
5. menerima dan mengolah data hasil pengujian dari tim Uji Kelayakan dan Kepatutan Calon Anggota Dewan Pengawas dan Calon Anggota Direksi;
6. menetapkan hasil penilaian dan menetapkan Calon Anggota Dewan Pengawas dan Calon Anggota Direksi;
7. menetapkan peringkat hasil penilaian proses Seleksi Calon Anggota Dewan Pengawas dan Calon Direksi Perusahaan Umum Daerah Bank Perkreditan Rakyat Kabupaten Cirebon;
8. melaporkan hasil seleksi kepada Bupati; dan
9. menindaklanjuti Calon Anggota Dewan Pengawas dan Calon Anggota Direksi terpilih untuk diajukan Fit and Proper Test kepada Otoritas Jasa Keuangan (OJK).

KETIGA : Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada Diktum KEDUA Panitia Seleksi bertanggung jawab kepada Bupati.

KEEMPAT : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Perusahaan Umum Daerah Bank Perkreditan Rakyat Kabupaten Cirebon.

KELIMA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sumber  
pada tanggal 11 Januari 2023

BUPATI CIREBON,



IMRON

Tembusan:

1. Yth. Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Cirebon;
2. Yth. Wakil Bupati Cirebon;
3. Yth. Inspektur Kabupaten Cirebon.



**PEMERINTAH KABUPATEN CIREBON**  
**SEKRETARIAT DAERAH**

Jl. Sunan Kalijaga No. 7 Telp. (0231) 321197 – 321792 Fax. 321025  
Website : [www.cirebonkab.go.id](http://www.cirebonkab.go.id) email : [setda@cirebonkab.go.id](mailto:setda@cirebonkab.go.id)

**S U M B E R**

---

**NOTA DINAS**

Kepada : Yth. Bapak Bupati Cirebon  
Dari : Kepala Bagian Perekonomian dan SDA Setda Kab. Cirebon  
Nomor : ~~90~~ / ~~07~~ - Rek&SDA  
Tanggal : 11 Januari 2023  
Sifat : Penting  
Lampiran : 1 (satu) berkas  
Perihal : Permohonan Penerbitan Keputusan Bupati Cirebon Tentang Pembentukan Panitia Seleksi Anggota Dewan Pengawas Perusahaan Umum Daerah Bank Perkreditan Rakyat Kabupaten Cirebon masa bhakti Tahun 2023-2027 dan anggota Direksi Perusahaan Umum Daerah Bank Perkreditan Rakyat Kabupaten Cirebon masa bhakti Tahun 2023-2028

---

Bahwa berdasarkan salinan Otoritas Jasa Keuangan Nomor: 4/ POJK.03/2015 tentang penerapan tata kelola bagi Bank Perkreditan Rakyat Pasal 4 dan Pasal 24 ayat (1) menyatakan BPR Yang memiliki modal inti paling sedikit Rp. 50.000.000.000,- (lima puluh milyar rupiah) wajib memiliki paling sedikit 3 (tiga) orang anggota Dewan Pengawas/ Direksi dan paling banyak sama dengan jumlah anggota Direksi/ Dewan Pengawas.

Berdasarkan pertimbangan diatas, kami mohon kiranya dapat menetapkan Keputusan Bupati Cirebon Tentang Pembentukan Panitia Seleksi Anggota Dewan Pengawas Perusahaan Umum Daerah Bank Perkreditan Rakyat Kabupaten Cirebon masa bhakti Tahun 2023-2027 dan anggota Direksi Perusahaan Umum Daerah Bank Perkreditan Rakyat Kabupaten Cirebon masa bhakti Tahun 2023-2028.

Demikian atas perkenannya kami sampaikan terima kasih.

KEPALA BAGIAN PEREKONOMIAN DAN SDA  
SEKRETARIT DAERAH,

**HILMAN FIRMANSYAH, ST**

Penata Tk. I

NIP. 19770303 1201001 1 006

Tembusan :  
Yth. Kepala Bagian Hukum Setda